

Ganjar Bantah Dalangi Masalah Sukoharjo

GUBERNURAN - Gubernur Jateng Ganjar Pranowo membantah menginstruksikan melakukan *black list* terhadap PT Ampuh Sejahtera (PT AS). Ganjar justru mengemukakan usulan tersebut murni datang dari Badan pemeriksa Keuangan (BPK) Jateng terhadap hasil laporan pemeriksaan (LHP) pembangunan Pasar Ir Soekarno di Sukoharjo.

"Saya malah tahunya dari media. Kalau hasil rekomendasi BPK suruh di *black list* ya ikuti saja prosedur hukum. Saya tidak menginstruksikan (pelaksanaan *black list*) itu putusan BPK. Gubernur akan memfasilitasi saja jika ada apa-apa, karena keputusan BPK sudah ada," jelas Ganjar di kompleks Gubernur beberapa waktu lalu.

Ganjar menekankan, permasalahan pelaksanaan pembangunan pasar Ir Soekarno jangan sampai menyengsarakan para pedagangnya. Jangan sampai hanya karena sedang tersandung perkara lain dalam pelaksanaannya, pedagang malah menjadi korban. "Prioritas pada keberlangsungan pedagangnya. Kalau tidak salah, Pemkab di sana



Foto: Fitria Rahmawati

Ganjar Pranowo

sudah turun tangan," timpalnya.

Kepala Sub Auditorat Jateng 1 BPK Hadiyati Munawaroh pun membantah

BPK melakukan kesalahan dalam pelaksanaan auditnya terhadap PT AS. Pihaknya menegaskan tidak ada pihak mana pun yang memperlambat kinerja BPK.

■ Mengaudit

"Kami memeriksa berdasarkan aturan misalnya APBD yang tiap tahun dilaksanakan. Kita juga bisa mengaudit berdasarkan laporan masyarakat, permintaan Pemda, dan DPRD. Itu empat hal yang dilaksanakan kami dalam melakukan pemeriksaan," jelasnya kepada wartawan.

Masalah pemeriksaan proyek pembangunan Pasar Ir Soekarno Sukoharjo, kata dia, diketahui detailnya. Ia memastikan, auditor BPK tidak mungkin diintervensi pihak-pihak tertentu. Sebab pekerjaan auditor berada di bawah pengawasan Inspektur Utama. "Ada Inspektur Utama yang mengawasi kualitas auditor," timpalnya.

Sebelumnya, Kepala Pelegalan PT AS Yoyok Sismoyo merasa laporan hasil pemeriksaan (LHP) BPK merupakan pesanan Pemkab Sukoharjo. ■ M9-Ks